

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pasca perang dunia II, Amerika Serikat berdiri sebagai pemimpin dunia yang hampir tidak tersaingi, menjadikannya sebagai kekuatan dominan dalam peredaran ekonomi dunia. Hal tersebut kemudian menjadikan Amerika Serikat berwenang untuk menentukan institusi dan menginisiasi peraturan-peraturan baru yang mendasari perekonomian dunia. Dengan lahirnya *Bretton Woods System* sebagai produk ekonomi unggulan Amerika Serikat yang menjadi induk dari terbentuknya lembaga-lembaga perekonomian dunia seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* dan *World Trade Organization* (WTO), dalam kiprahnya sistem tersebut berhasil membawa Amerika Serikat pada kejayaan karena Amerika Serikat memegang kendali atas lembaga-lembaga tersebut berdasarkan kepentingannya. Sehingga walaupun terhitung sempat mengalami krisis, Amerika Serikat mampu bangkit kembali dalam kepemimpinannya dalam perekonomian dunia yang terserap dalam setiap kebijakan-kebijakan perekonomian melalui *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* dan *World Trade Organization* (WTO). Selain itu, Amerika Serikat juga menjadi negara kreditor terbesar didunia yang mampu memberikan pinjaman atau bantuan kepada negara-negara berkembang berupa *Marshall Plan* dan bantuan *Grants in Aid* yaitu bantuan ekonomi dengan memberikan sejumlah kewajiban kepada negara yang diberikan bantuan untuk mengembalikan bantuan ekonomi tersebut berupa dolar atau dengan membeli barang-barang produksi Amerika Serikat (Hussein, 2013). Inilah yang kemudian menjadi banteng kekuatan ekonomi Amerika Serikat hingga saat ini.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya dan merupakan negara dengan pasar modal yang sangat kuat pada sebagian besar sektor perdagangan internasional mengutamakan perekonomian sebagai salah satu sektor yang diperkuat untuk membantu mencapai tujuan negara melalui sistem internasional. Pada tahun 2017 Amerika Serikat berada di peringkat teratas dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar \$18,6 triliun (Economics, 2017) hal ini disebabkan oleh faktor *tax cuts* (pemotongan pajak), *deregulation* (deregulasi) dan *infrastructure spending by the Trump administration* (belanja infrastruktur pada era administrasi trump) (Minerd, 2017). Posisi kuat ekonomi Amerika Serikat tersebut kemudian menjadikan AS sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh pada lalu lintas perekonomian dunia. Fenomena serta kebijakan yang dialami AS sangat mungkin untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap negara-negara lainnya,

seperti salah satunya Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang memiliki andil besar dalam perekonomian dunia dengan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) 2017 terbesar kedua didunia setelah AS yaitu \$11,4 triliun. Ekonomi Tiongkok berhasil tumbuh sekitar 6,9% pada tahun 2017 (Wirayani, 2018). Dimana sektor jasa menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan PDB Tiongkok (News B. , 2018).

Posisi AS dan Tiongkok yang memiliki tingkat kekuatan setara pada sistem ekonomi internasional diikuti dengan hubungan dagang antar keduanya kemudian melahirkan dinamika konflik pada tahun 2018 dimana defisit neraca perdagangan AS ke Tiongkok mencapai \$38,7 miliar dengan nilai total impor AS ke Tiongkok melebihi ekspor ke negara tersebut sebesar \$419,2 miliar (iNews.id, 2019). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Tiongkok memiliki tenaga kerja yang lebih besar cakupannya dan murah sehingga menjadikan perusahaan AS melakukan *outsourcing manufacture*. Selain itu, defisit neraca perdagangan ini juga disebabkan oleh Tiongkok yang telah dituduh terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil, seperti manipulasi mata uang dan pencurian kekayaan intelektual. Bagi AS sebagai negara dengan sektor ekonomi terkuat melihat keadaan ini sangat merugikan karena hal ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di industri tertentu milik AS. Selain itu defisit perdagangan dapat menekan nilai dollar AS yang dapat menyebabkan inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi (Amadeo, 2021). Sedangkan bagi Tiongkok, neraca perdagangan yang surplus terhadap AS menjadikan hal ini sebagai kekuatan baru Tiongkok pada lalu lintas perdagangan. Dengan adanya defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok, AS yang saat itu dipimpin oleh Donald Trump berusaha menurunkan angka defisit dengan memberlakukan tarif pada barang-barang Tiongkok. Namun dalam prosesnya, Tiongkok melakukan perlawanan untuk tetap mempertahankan stabilitas negara dengan menetapkan kenaikan tarif balasan, hal tersebut yang kemudian sulit dihindari dan memunculkan fenomena perang dagang AS vs Tiongkok. Defisit perdagangan AS-Tiongkok telah menyebabkan ketidakcocokan ekonomi makro antara kedua negara dan menggeserkan posisi keseimbangan kekuatan global.

Perang yang awalnya dilihat sebagai konflik perselisihan perdagangan berubah menjadi pertempuran supremasi teknologi. Semikonduktor menjadi komponen penting dalam segala hal yang diperlukan baik dari peralatan rumah tangga hingga peralatan militer dan kedua negara *superpower* yaitu AS-Tiongkok berlomba-lomba untuk mendominasi dalam bidang ini. Setelah

sebelumnya AS membuat kebijakan penolakan terhadap teknologi internet 5G Huawei milik Tiongkok di Amerika pada tahun 2019 silam dengan tuduhan bahwa Tiongkok dapat menggunakan infrastruktur 5G-nya untuk hal spionase. AS kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Huawei di tengah klaim bahwa perusahaan tersebut melanggar sanksi terhadap Iran dan Korea Utara. Departemen perdagangan AS menempatkan Huawei dalam daftar entitas yang melarang perusahaan AS memperdagangkan item tertentu dengan entitas yang disebutkan dalam daftar kecuali mereka memperoleh izin lisensi (Fung, 2023). Departemen kehakiman AS juga turut mendakwa Huawei dengan tuduhan mencuri teknologi AS, konspirasi, penipuan bank, pemerasan serta membantu Iran untuk menghindari sanksi dagang (Pompeo, 2020). Tindakan ini kemudian berdampak besar pada bisnis Huawei, dimana sanksi yang diberlakukan telah memperlambat pertumbuhan pendapatan Huawei (Corera, 2021).

Tidak sampai disitu, eskalasi konflik ini semakin diperparah akibat adanya pemblokiran pasokan *chip* yang dilakukan oleh AS ke Tiongkok secara resmi pada 14 Oktober 2020. Kebijakan baru ini juga mengakibatkan pemblokiran *chip* buatan luar negeri yang diproduksi dengan teknologi AS untuk digunakan oleh perusahaan Tiongkok. Seperti diketahui bahwa perusahaan Tiongkok tidak mampu menciptakan teknologi canggih berupa fabrikasi chip 7nm (nanometer) yang diperlukan dalam pembuatan perangkat Huawei, masalah utama bagi Tiongkok adalah adanya pembatasan kepemilikan Tiongkok atas mesin litografi yang dibekali teknologi *Extreme Ultraviolet* (EUV) yaitu mesin yang menjadi alat utama untuk membuat chip dengan fabrikasi yang lebih kecil dan canggih, mesin canggih tersebut merupakan salah satu dari teknologi AS. Menurut pemerintah AS, mengekspor semikonduktor dan mesin pembuat *chip* ke Tiongkok setara dengan memungkinkan Tiongkok dan militernya mengakses *chip* dan peralatan pembuatan *chip* paling canggih, yang menimbulkan risiko keamanan nasional yang signifikan bagi AS (Riyanto, 2022). Disamping berdampak pada persaingan inovasi dan pengembangan teknologi, ketegangan antara kedua negara ini telah menciptakan risiko lain bagi kedua negara dan negara-negara lain di dunia. Kedua negara ini telah menderita kerugian yang signifikan dalam perang dagang yang berkecamuk sejak 2018 silam, perang teknologi yang kemudian lahir sebagai bentuk konflik lanjutan dari perang dagang ini telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi sepuluh negara mitra AS dan Tiongkok terutama dalam variable kinerja ekspor, perang teknologi juga menyebabkan perlambatan ekonomi global, dengan permintaan global menurun sehingga menyebabkan volume dan harga barang yang diperdagangkan secara global tetap rendah. Dari kerugian yang dijelaskan

sebelumnya, terlihat jelas bahwa semikonduktor memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan negara-negara di dunia karena berbagai alasan, termasuk penggunaannya dalam elektronik, seperti komputer, smartphone dan televisi. Maka dari itu, dalam hal ini semikonduktor menjadi komponen penting dalam pembuatan perangkat elektronik tersebut dan negara yang memiliki industri semikonduktor yang kuat dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang menyertainya. Selanjutnya, semikonduktor juga dapat digunakan dalam sistem kontrol daya, termasuk yang digunakan dalam elektronik industri seperti mengatur aliran listrik dan memperkuat sinyal serta menjadikannya komponen penting dalam banyak aplikasi industri. Semikonduktor juga digunakan dalam pembuatan mikroelektronika, termasuk mikroprosesor dan *chip* memori. Komponen-komponen tersebut sangat penting dalam pengembangan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan, robotika dan *Internet of Things* (IoT) yang didefinisikan sebagai interkoneksi melalui Internet perangkat komputasi yang tertanam dalam objek sehari-hari, sehingga memungkinkan untuk mengirim dan menerima data. Atau dalam penjelasan sederhana lain, IoT adalah kemampuan berbagai perangkat, objek, kendaraan, rumah, dan benda-benda lainnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet (Mambang, et al., 2022). Dalam hal penggunaan semikonduktor ini, kemudian berdampak pada berbagai industri secara global, Malaysia menjadi salah satu negara yang menjunjung tinggi pentingnya semikonduktor dalam ekonomi modern, karena kekurangan pasokan semikonduktor global telah menekankan pentingnya komponen dalam perekonomian Malaysia.

Melihat keadaan tersebut, Amerika Serikat memasang taktik perlawanan kembali melalui *Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp* (TSMC) yang merupakan salah satu dari tiga pabrik pembuat *chip* yang memproduksi *chip* terbesar di dunia, bersama Samsung dan Intel. Yang memproduksi sekitar 90% pasar untuk prosesor canggih. Pelanggan utama TSMC termasuk perusahaan *processor* dan *graphics* seperti *Advanced Micro Devices* (AMD), *NVIDIA Corporation*, Apple dan teknologi raksasa Tiongkok yaitu Huawei. Dalam hal ini Taiwan sangat mendominasi produksi chip yang menggerakkan hampir seluruh teknologi sipil dan militer yang membuatnya sangat diperlukan bagi AS dan Tiongkok. Taiwan adalah pemasok semikonduktor penting ke Tiongkok, mitra dagang terbesar pulau itu dengan penjualan semikonduktor Tiongkok tumbuh lebih dari 30% pada tahun 2020 dan mencapai hampir \$40 miliar, menurut angka dari Asosiasi Industri Semikonduktor (Iyengar, 2022). Melihat keadaan ini, melalui TSMC AS kembali memberlakukan pembatasan pada perusahaan semikonduktor terbesar milik Tiongkok

yang kemudian menyebabkan peningkatan fokus Tiongkok hanya terbatas pada manufaktur domestik, diketahui bahwa Taiwan melalui TSMC merupakan salah satunya perusahaan semikonduktor yang mampu menciptakan chip sebesar 2nm (nanometer) dan 3nm (nanometer), yang mana 2x lipat lebih kecil daripada chip yang mampu di ciptakan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, maka dari keunggulan tersebutlah, Amerika Serikat kemudian menggandeng Taiwan melalui TSMCnya untuk menekan dominasi Tiongkok. Dari hal tersebutlah kemudian retorika konflik antara keduanya menjadikan semikonduktor sebagai “medan perang utama” dari perang teknologi AS vs Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana Strategi AS terhadap ancaman kekuatan ekonomi Tiongkok pada bidang semikonduktor di dalam perang teknologi?”

1.3 Kerangka Pemikiran

a. Balance of Power

Perspektif Realisme merupakan sebuah kerangka berfikir yang berakar dari sebuah pemikiran Thomas Hobbes yang melihat kondisi alamiah manusia secara alami sebagai sebuah makhluk yang sombong dan memiliki insting natural untuk mendominasi dan menuntut rasa hormat dari manusia lainnya. Menurut Hobbes, keadaan yang dimiliki oleh manusia bagaikan sebuah peperangan dimana para manusia tersebut hidup dalam sebuah dunia yang penuh dengan unsur individual, miskin, keji, kasar, dan brutal yang membuat sifat alamiah manusia dikarakteristikan dari sebuah kekerasan, dan kepentingan pribadi yang berbahaya (*Extreme Individualism*).

Dari sinilah Hobbes juga mengatakan bahwa umat manusia hidup untuk berperang dengan seluruh dunia “*War against All*” demi memenuhi hasrat alamiah yang muncul dari dalam diri mereka (Finn). Dengan menggunakan perspektif ini, terdapat teori yang dirasa penulis sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah tertera dalam tulisan ini. Teori dalam perspektif realisme tersebut yaitu *Balance of Power*. Teori *Balance of Power* (Penyeimbangan kekuasaan) adalah sebuah teori yang sudah tidak asing lagi didengar oleh para akademisi ilmu

Hubungan Internasional, teori ini juga memiliki sebuah arti bahwa penyeimbangan kekuatan atau kekuasaan, didalam situasi yang merepresentasikan *Balance of Power* adalah ketika sebuah negara mengurus masalah yang ada didalam negaranya dan berusaha untuk membangun negaranya dalam berbagai sektor secara signifikan sebagai cara untuk mengurus masalah negara yang berkaitan dengan banyak sektor, semua ini dilakukan sebagai sebuah respon untuk menandingi atau menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh negara lain.

Menurut James F. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff dalam bukunya yang berjudul *Contending Theories of International Relations* yang diterbitkan pada tahun 1997, didalam studi hubungan Internasional terdapat sangat banyak teori yang telah terlahir dari akademisi dan ilmuan yang mendalaminya, namun karena banyaknya teori yang ada, maka ada beberapa dari teori tersebut yang kemudian menjadi tertinggal oleh zaman. Namun ada juga teori yang meskipun sudah lama ditemukan, masih memiliki sebuah relevansi terhadap studi Hubungan Internasional dan juga masih digunakan bahkan sampai sekarang dalam menjelaskan perilaku dari sebuah negara. Beberapa dari teori yang masih relevan dan memiliki jangkauan yang sangat luas dan umum sampai sekarang disebut sebagai *Grand Theory*, yang tentu saja teori *Balance of Power* merupakan salah satu dari *Grand Theory* atau teori utama dalam studi Hubungan Internasional sampai dengan sekarang. Meskipun setelah buku ini terbit banyak teori HI lain yang muncul dan berkembang, namun buku ini tetaplah menjadi salah satu buku terlengkap yang membahas tentang teori-teori yang dimiliki studi Hubungan Internasional (Jr, 1956).

Teori *Balance of Power* merupakan sebuah teori yang membahas tentang sebuah penyeimbangan kekuatan dan kekuasaan yang telah ada dalam sistem internasional sejak lama. Tentu saja teori ini membahas tentang sebuah kondisi dimana sebuah negara berpengaruh dalam sistem internasional berusaha untuk menciptakan sebuah kondisi yang seimbang untuk mencegah sebuah entitas tertentu menjadi terlalu kuat sehingga memiliki kapabilitas untuk memaksakan kehendaknya dan mencampuri kepentingan orang lain. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh banyak sejarawan pada sekitar era Tiongkok kuno, era Renaissance, sampai dengan penelitian di abad ke 18 dan juga 19, konsep dari penyeimbangan kekuasaan atau *Balance of Power* ini telah lama diberlakukan oleh banyak raja pada masa lalu. Meskipun konsep dari teori ini sudah lama digunakan dan di implementasikan di masa lalu, namun teori *Balance of Power* pertama kali diperkenalkan oleh Ernst b. Haas pada tahun 1953 didalam jurnalnya yang berjudul "*The Balance*

of Power: Prescription, Concept, or Propaganda". Didalam tulisan nya, Ernst b. Haas mengatakan bahwa teori *Balance of Power* memiliki banyak arti yaitu (1) *Balance* sebagai artian '*Distribution of Power*' yang berarti bahwa keseimbangan kekuatan merupakan sebuah pendistribusian atau penyetaraan dari kekuatan, (2) *Balance of Power* sebagai arti dari '*Equilibrium*' yang berarti bahwa keseimbangan kekuatan merupakan sebuah gabungan dari dua atau lebih pendapat dari pihak yang berbeda, (3) *Balance of Power* sebagai arti '*Hegemony*' yang berarti bahwa keseimbangan kekuatan merupakan sebuah pencarian tahta tertinggi dimana akan terjadi stabilitas jika ada pihak yang memiliki kekuatan terbesar dan pihak lain memiliki kekuatan yang lebih kecil. (4) *Balance of Power* sebagai arti '*Stability and Peace*' yang berarti bahwa keseimbangan kekuatan akan tercipta dengan adanya perdamaian dan stabilitas, Haas mengatakan bahwa keseimbangan kekuatan bukanlah metode untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas namun perdamaian dan stabilitas itu sendiri lah yang identik dengan keseimbangan kekuatan, (5) *Balance of Power* sebagai arti '*Instability and War*' yang berarti bahwa keseimbangan kekuatan merupakan kondisi yang mencerminkan ketidakstabilan dan peperangan, dan perdamaian hanya dapat tercipta dengan adanya kerjasama, (6) *Balance of Power* sebagai arti '*Power Politics*' atau kekuatan politik dimana keseimbangan kekuatan dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam ranah politik yang berarti akan terjadi keseimbangan jika kekuatan politik berkuasa, (7) *Balance of Power* sebagai arti '*Universal Law of History*', disini keseimbangan kekuatan dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang telah menjadi umum atau *universal* dalam sejarah perkembangan manusia, menurut John Basset Moore didalam tulisan Haas, mengatakan bahwa "keseimbangan merupakan sebuah kumpulan dari "insting primitif" dari "*self-defense*" atau perlindungan diri dan juga gabungan dari seluruh masalah manusia", (8) *Balance of Power* sebagai arti '*System and Guide to Policy Making*' yang berarti bahwa keseimbangan kekuatan merupakan sebuah sistem yang akan mencegah beberapa negara untuk menjadi terlalu kuat yang pada akhirnya akan memaksakan kehendaknya pada pihak yang lemah. Maka dari itulah keseimbangan kekuatan disebut sebagai sistem dan panduan dalam membuat sebuah kebijakan. Menurut Haas, sebuah keseimbangan kekuatan merupakan sebuah hal yang kompleks dan dapat dikatakan rumit karena banyaknya pengertian dari teori itu sendiri, karena konsep ini telah lama dipergunakan dan diimplementasikan di masa lalu oleh banyak pemimpin bahkan sebelum penamaan dari teori "*Balance of Power*" itu sendiri terlahir (Haas, 1953).

Seiring dengan hal tersebut, terdapat sebuah pertanyaan besar dalam ilmu *Balance of Power* atau penyeimbangan kekuatan dan kekuasaan mengenai apa yang membuat sebuah negara tertarik untuk melakukan *balancing* atau *Balance of Power*. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka diperlukanlah sebuah akar pembahasan dari sebuah negara yang mengejar keseimbangan, hal tersebut adalah asal-muasal atau sifat dasar dari manusia itu sendiri (*Human Nature*) yang cenderung memiliki sifat yang tidak berubah seiring dengan berjalannya sejarah yang selalu berusaha untuk memuaskan hasrat dan nafsu pribadi yang dimilikinya, dari nafsu pribadi manusia inilah pada akhirnya mereka menggunakan negara sebagai sebuah instrumen untuk mengejar kekuatan, kekayaan, dan juga kemakmuran untuk mendapatkan sebuah dunia yang ideal bagi mereka sendiri (Sheehan, 1996).

Maka dari itulah dalam buku karya Michael Sheehan yang berjudul *The Balance of Power: History and Theory* menjelaskan bahwa sifat dasar dari Hubungan Internasional dapat dilihat sebagai sebuah hal yang tidak berubah selama bertahun-tahun sepanjang sejarah manusia dimana Hubungan Internasional dipandang sebagai sebuah usaha untuk mencari keuntungan pribadi dan pencarian kekuasaan antar aktor di ruang lingkup Internasional dan seiring dengan berjalannya waktu, hal ini menjadi sebuah kompetisi ketika negara lain memiliki kekayaan dan kekuasaan lebih besar dari negara lainnya, maka negara yang tertinggal tersebut akan merasakan sebuah kekhawatiran dimana mereka akan merasa terancam dan akhirnya mereka pun berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan dan kekayaan yang dimiliki oleh negara lain yang bisa disebut sebagai *Balance of Power* (Sheehan, 1996). Sebuah negara akan menjalankan sistem kenegaraan dan berusaha untuk mencapai tujuan pribadinya, untuk dapat mencapai seluruh kepentingan nasional yang dimiliki oleh sebuah negara dengan lancar dan tanpa hambatan, maka negara tersebut membutuhkan sebuah hal yang dinamakan sebagai *The Centrality of Power* (Sentralitas kekuatan) atau yang juga disebut juga sebagai pusat kekuatan. Seiring dengan berjalannya waktu, semua kepentingan nasional dapat dirangkap sebagai sebuah "kekuatan", contohnya seperti kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan budaya, kekuatan sumber daya manusia dan daya alam, semua kekuatan ini dirangkap sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah negara (Sheehan, 1996).

Seiring dengan hal tersebut, teori *Balance of Power* melihat *International Society* atau masyarakat internasional sebagai sebuah kondisi yang tidak seimbang dimana ada sebuah kekuatan

yang besar yang akan menaiki tahta internasional dan juga ada kekuatan kecil yang berusaha untuk berkembang ditengah-tengah kekuatan besar yang saling bersaing dan berkompetisi untuk mendapatkan kekuatan terbesar di dunia (Sheehan, 1996). Maka dari itulah, karena adanya pengejaran akan kekuatan ini, maka penyeimbangan kekuatan dalam lingkup Internasional yang didesain untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuatan negara-negara besar tidak dapat dipungkiri lagi merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena tidak hanya digunakan untuk memperebutkan kekuatan dan kekayaan, namun juga diperlukan untuk mendapatkan kondisi dunia yang stabil dalam ruang lingkup Internasional jika dijelaskan secara singkat, selain agar menjadi negara yang paling sukses, negara hegemon di dunia juga berusaha untuk menciptakan sebuah kondisi yang stabil dalam lingkup Internasional atau dapat dikatakan sebagai *The Balancer* menurut Michael Sheehan.

Maka dari itulah, banyak negara khususnya negara-negara hegemon atau negara-negara sentral yang memiliki kekuatan dan kekuasaan besar menjadi semakin tertarik dan cenderung untuk melakukan *balancing* atau penyeimbangan atas kekuatan. Seiring dengan ini, *The Balancer* atau sebuah peran sebagai penyeimbang dalam sistem Internasional hanya dapat dilakukan oleh negara yang memiliki sebuah kapabilitas *Power* yang besar baik dalam hal ekonomi maupun militer. Menurut Michael Sheehan, terdapat dua pertimbangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan kapabilitas ekonomi dan militer yang besar untuk memilih perannya sebagai penyeimbang atau *Balancer*. Dua pertimbangan tersebut meliputi, 1). Adanya sebuah ketakutan akan ancaman negara lain yang memiliki kuasa dan kesempatan yang besar untuk mendominasi, 2). Untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan permanen dalam sistem Internasional sebagai sebuah konsekuensi dari upaya hegemoni yang dilakukan oleh negara besar lain. Maka dari itu, penulis menggunakan teori *Balance of Power* sebagai teori untuk menjawab penelitian ini agar penulis dapat menjawab apakah pertimbangan Amerika Serikat dalam menjadikan TSMC sebagai salah satu strategi *Balancing* demi meraih tujuan eskalasi kekuatannya didalam perang teknologi melawan Tiongkok yang merupakan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Amerika Serikat menjadikan TSMC sebagai pion utama perlawanan karena mengalami sebuah kekhawatiran akan kekalahan dalam hal keunggulan produk pengembangan teknologi yang akhirnya berusaha untuk mengimbangi kekuatan dari Tiongkok berupa teknologi 5G melalui SMIC yang mereka miliki dengan *Balance of Power*.

b. Soft Balancing

Dengan adanya teori *Balance of Power*, maka penulis dapat menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dengan melihat perilaku dan pertimbangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menjadikan TSMC sebagai salah satu strategi *Balancing* demi meraih tujuan eskalasi kekuatannya didalam perang teknologi melawan Tiongkok dengan dibantu oleh konsep *soft balancing* yang juga dapat membantu teori *Balance of Power* dalam menjawab penelitian ini. Pape mendefinisikan *soft balancing* sebagai tindakan nonmiliter yang digunakan untuk “*delay, frustrate, and undermine*” kebijakan militer Amerika yang agresif dan unilateral untuk memperoleh keamanan. *Soft balancing* ada karena memang dinamika *high politics* tidak terlalu dianggap menjadi permasalahan utama dikarenakan dinamika hubungan manusia itu sendiri berkembang dan berubah sesuai kebutuhan, jadi memang intinya, *soft balancing* ada karena kebutuhan *low politics* seperti halnya ekonomi di masa sekarang lebih diutamakan, karena fokus negara-negara saat ini kebanyakan mengutamakan kesejahteraan ekonominya. He dan Feng menuliskan bahwa *soft balancing* merupakan sikap mengimbangi negara musuh atau negara yang berpotensi mengancam dengan cara kerjasama bilateral dan multilateral. Berdasarkan perkembangan fokus negara-negara saat ini tentang teori *balance of power* yang mengenai sebuah kerjasama atau perjanjian tertentu, Robert A. Pape membagi *soft balancing* menjadi 4 kategori, salah satunya adalah yang disebut dengan *Economic strengthening* adalah upaya suatu negara yang bersatu dengan negara/aktor lainnya untuk melakukan *balancing* kepada negara superpower dengan cara menguatkan dan meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Ini juga dilakukan dengan memperbesar porsi transaksi perdagangannya kepada negara-negara anggota dan memperkecil volume perdagangan dengan negara superpower yang mereka coba imbangi, dengan begitu diharapkan kekuatan negara superpower akan menurun dan menurunkan hegemoninya.

Maka dari itu bagi penulis, konsep keseimbangan kekuasaan ini dapat menjawab rumusan masalah dan juga dapat menyelesaikan tulisan yang diteliti oleh penulis. Konsep tambahan yang merupakan turunan dari *Balance of Power* ini ditambahkan oleh penulis guna melihat alasan lebih dalam Amerika Serikat menjadikan TSMC sebagai salah satu strategi *Balancing* yang ternyata tidak hanya berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi Tiongkok pada bidang

semikonduktor, namun juga sebagai upaya penguatan konektivitas ekonomi dan perdagangan AS di dalam bidang semikonduktor melalui produk pengembangan teknologi.

c. Konsep Proxy War

Proxy War atau Perang proksi adalah perang antara dua negara di mana aktor negara atau pihak eksternal non-negara terlibat dalam atmosfer dinamika konflik yang ada. Perang ini bertujuan untuk menyalurkan senjata, pelatihan, dan dana untuk kepentingan individu maupun aliansi. Secara sederhana, *proxy war* dapat diartikan sebagai sebuah perang yang didalam mekanismenya menggunakan media proksi atau perantara. Dalam hal ini, *proxy war* merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi dimana suatu negara berusaha untuk menjalankan tujuan strategisnya dengan menggunakan media pengganti yaitu aktor luar negara (*actor non-state*), dimana pada saat yang sama, negara tersebut berusaha menghindari keterlibatan secara langsung didalam kondisi perang (Mumford, 2013). *Proxy war* yang dilakukan oleh aktor luar negara yang dimaksudkan dalam tulisan ini, tidak terbatas pada pendekatan *hard power* seperti pemberontakan atau terorisme, tetapi lebih menggunakan pola pendekatan *soft power* seperti pendekatan ekonomi, teknologi dan keuangan (Hidayat & Gunawan, 2017). Adagium *enemy's enemy is friend* kerap diimplementasikan dalam melakukan soft power didalam mekanisme *proxy war* ini.

Pada penelitian ini, konsep proxy war kemudian muncul sebagai suatu konsep tambahan yang memiliki relevansi dengan variabel yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini, Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan variabel utama sebagai aktor negara yang saling bermusuhan yang kemudian salah satu dari aktor negara tersebut yaitu Amerika Serikat memanfaatkan penggunaan aktor luar negara yaitu TSMC (*Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp*) sebagai media proksi dalam strategi balancing untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi Tiongkok pada bidang semikonduktor didalam perang teknologi yang bertujuan untuk menghindari terjadinya konfrontasi secara langsung yang lebih besar. Adapun keterkaitan konsep proxy war yang telah penulis uraikan dengan penelitian yang penulis angkat adalah, penelitian ini kemudian akan membahas bentuk-bentuk intervensi proxy yang dilakukan Amerika Serikat. Dimana terdapat bantuan-bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap pemerintahan Taiwan sehingga mampu membuat Taiwan melalui TSMC (*Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp*) berperan sebagai media proksi di dalam perang teknologi, disamping adanya konflik politik antara Taiwan dan Tiongkok.

1.4 Hipotesa

Amerika Serikat menggunakan TSMC (*Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp*) dalam perang teknologi terhadap Tiongkok sebagai bentuk strategi economic soft balancing atau alat untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi Tiongkok pada bidang semikonduktor. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan TSMC dalam perdagangan pada bidang semikonduktor sebagai produk pengembangan teknologi unggulan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh seorang penulis untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Studi Pustaka dengan mencari data dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Studi Pustaka digunakan sebagai referensi ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang sedang berjalan. Studi pustaka juga kerap disebut studi literatur, kajian Pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis dan tinjauan teoritis. Penggunaan studi pustaka ini juga bertujuan untuk menjelaskan teori-teori pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi Pustaka juga dapat menambah wawasan penulis yang berhubungan dengan objek yang sedang menjadi bahan penelitian. Manfaat dari studi Pustaka diantaranya, peneliti dapat mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan, mengetahui teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Melalui studi Pustaka atau studi literatur peneliti juga dapat mengetahui batas pertanyaan atau rumusan masalah yang akan diangkat. Sumber dari studi Pustaka sendiri beragam, contohnya seperti Jurnal Penelitian, Laporan hasil penelitian, abstrak jurnal, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Amerika Serikat dalam perang teknologi melawan Tiongkok dengan menggunakan TSMC sebagai salah satu alat balancing kekuatan semikonduktor.

1.7 Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup jangkauan penelitian adalah batasan waktu sampai dimana penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dan tertata sehingga dengan adanya jangkauan penelitian akan menambah batasan keabsahan data dan tidak terlampaui jauh dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan. Penelitian ini dibatasi di tahun 2018-2020, karena tahun tersebut merupakan tahun dimana terjadinya perang teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I

Pada BAB I terdapat judul, kemudian dilanjutkan pada latar belakang mengenai temuan dan urgensi topik yang dijadikan sebuah penelitian. Kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah, setelah mengetahui latar belakang dari kasus yang dipilih, penulis harus mencari Rumusan Masalah yang kemudian dilanjutkan dengan kerangka Teori. Lalu penulis membuat hipotesis sebagai jawaban sementara dari penelitian. Selanjutnya untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat diawal, maka penulis menyertakan Metode Penelitian, pada BAB ini juga memuat Tujuan dan Batasan Penelitian yang menjelaskan apa tujuan dari dilakukannya penelitian ini dan Batasan waktu atau data yang digunakan sebagai sumber referensi. Terakhir yaitu sistematika penulisan untuk menguraikan apa saja yang terdapat dalam penelitian.

BAB II

Penulis akan menjabarkan secara lebih detail terkait konflik permasalahan perang teknologi AS-Tiongkok dan hadirnya gagasan TSMC sebagai alat *balance of power* Amerika Serikat kepada Tiongkok.

BAB III

Penulis akan berusaha membuktikan apakah Hipotesis yang telah dibuat diawal benar atau tidak dengan data-data yang diperoleh melalui metode yang telah ditentukan untuk melakukan penelitian dengan mengimplementasikan teori yang digunakan yaitu teori *balance of power* dan teori turunannya yaitu teori *soft balancing* serta konsep *proxy war* sebagai konsep tambahan yang memiliki relevansi dengan variabel yang diteliti oleh penulis.

BAB IV

Penulis kemudian menuliskan kesimpulan apa yang didapat setelah melakukan dan menyelesaikan penelitian